



RISALAH KEBIJAKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEMBERDAYAAN KKG DAN MGMP SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KOMPETENSI GURU MENERAPKAN K-2013

Pesan Kunci

Monitoring dan evaluasi terhadap KKG dan MGMP digunakan untuk memperbaiki program-program di KKG/MGMP termasuk pembinaannya. Selanjutnya, direkomendasikan tentang perlunya evaluasi seluruh program KKG/MGMP yang hasilnya digunakan untuk menyempurnakan program pelatihan K-2013 oleh pemerintah maupun program KKG/MGMP.

Perlunya Pemberdayaan KKG-MGMP

Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam implementasi K-2013, telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan K-2013 yang berlangsung secara berjenjang dan bertahap. Pelatihan K-2013 masih menjumpai banyak kendala, antara lain: jumlah guru yang terlalu besar, lokasi sekolah yang terpencil, kualitas instruktur yang kurang memadai, sarana dan prasarana yang kurang, materi dan waktu yang disamakan untuk seluruh peserta, dan terbatasnya frekuensi pelatihan. Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan wadah profesional bagi guru yang seharusnya dapat berperan mengatasi permasalahan penerapan K-2013. KKG adalah wadah kegiatan profesional bagi guru SD/MS/SDLB di tingkat kecamatan yang terdiri dari sejumlah guru dari sejumlah kecamatan. MGMP adalah wadah kegiatan profesional bagi para guru mata pelajaran yang sama pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK di tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari sejumlah guru dari sejumlah sekolah. Tujuan kajian adalah menghasilkan usulan rekomendasi berupa konsep model pemberdayaan KKG dan MGMP pada penguatan kompetensi guru mengimplementasikan K-2013. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan analisis diskriptif. Lokasi pengumpulan data yakni: Kota Bandung, Kota Sorong, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Bima. Temuan hasil kajian: 1) kepengurusan KKG-MGMP ditetapkan secara mandiri di sekolah dan/atau melalui gugus sekolah, 2) program utama KKG-MGMP adalah mendukung keterlaksanaan penerapan K-2013 karena dapat membantu guru dalam mengatasi kendala penerapan K-2013, 3) pemantauan dan evaluasi masih bersifat administrasi, dan 4) dinas pendidikan belum berperan optimal.

KEORGANISASIAN KKG/MGMP

Sebagai wadah profesional bagi guru-guru, KKG/MGMP sangat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar anggotanya. Manfaat langsung KKG/MGMP: 1) memberikan solusi saat anggota menghadapi permasalahan dalam pembelajaran dan penilaian, 2) meningkatkan kemampuan guru tentang berbagai hal yang berhubungan dengan implementasi K-2013, 3) menjadi media pertukaran bagi guru untuk mendapatkan informasi tentang K-2013, merencanakan dan melaksanakan, substansi materi pelajaran, penyusunan soal, berbagai varian metode pembelajaran yang menarik, 4) menstimulus guru untuk berbagi pengetahuan dan membangun kolaborasi antar guru, 5) meningkatkan produktivitas guru dalam menghasilkan karya tulis yang inovatif, 6) secara tidak langsung mendukung keberhasilan belajar siswa, 7) menumbuhkan karakter guru pembelajar dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalismenya, serta 8) membuka peluang bagi guru untuk memiliki kemampuan menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi di sekolah dan mencari solusinya dalam konteks penerapan di sekolah.

Berkenaan dengan kepengurusan, ada dua cara pembentukan pengurus KKG/MGMP. Cara dimaksud yakni: pembentukan pengurus di sekolah atau secara mandiri dan pembentukan pengurus melalui gugus sekolah. Pembentukan pengurus secara mandiri, biasanya terjadi di sekolah besar, berupa yayasan untuk sekolah swasta atau sekolah dengan jumlah rombongan besar. Pengurus KKG/MGMP ada yang ditetapkan melalui musyawarah seluruh anggota dan pengurus seperti di Sorong serta Kulonprogo dan ada pula yang diawali dengan pembahasan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) terlebih dulu sebelum ditetapkan oleh dinas pendidikan seperti di Bandung.

Intervensi dinas pendidikan kota Bandung dalam penetapan pengurus KKG/MGMP adalah untuk kepentingan pembinaan dan untuk menjamin kelancaran program-program yang dicanangkan oleh dinas pendidikan. Pengurus KKG/MGMP paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi: seksi perlengkapan (sarpras), dan seksi-seksi lainnya. Kepala sekolah yang ada di lingkup KKG dan MGMP biasanya menjadi pengarah dan ada juga yang diangkat menjadi ketua. Pengurus disahkan oleh dinas pendidikan kab/kota dengan SK kepala dinas. Salah satu tugas yang diemban pengurus adalah mengetahui dan menyetujui program yang diajukan oleh anggota.

Kegiatan KKG/MGMP

Perencanaan kegiatan dilakukan bersama oleh semua anggota dan pengurus. Prioritas perencanaan kegiatan dibuat berdasarkan urgensi dan kebutuhan anggota terutama mengenai materi-materi dan kompetensi yang harus dikuasai oleh anggota tentang kurikulum dan pembelajaran di kelas. Perencanaan program antara lain mencakup: pemahaman konsep kurikulum, dan konten masing-masing mata pelajaran terutama di MGMP. Kegiatan yang dilaksanakan di KKG maupun di MGMP, bisa dalam lingkup sekolah terutama kalau sekolah besar, lingkup gugus, maupun lingkup kecamatan. Kegiatan yang berlangsung bisa pelatihan murni dengan instruktur yang dipilih oleh anggota dan pengurus, dan bisa juga dalam bentuk pelatihan tutor sebaya dengan tujuan agar dapat menstimulus guru untuk berbagi pengetahuan dan membiasakan berkolaborasi antar guru.

Program KKG dan MGMP utamanya adalah untuk mendukung keterlaksanaan implementasi K-2013 oleh guru di sekolah. Oleh sebab itu, program-program yang dikembangkan oleh KKG dan MGMP selalu pada konteks K-2013. Salah satu program adalah pelatihan K-2013 dan segala aspek pendukungnya. Pelatihan K-2013 di KKG dan MGMP mencakup aspek: nara sumber atau instruktur, sarana dan prasarana, dan ketersediaan dana pendukung.

Instruktur untuk pelatihan di KKG/MGMP, biasanya ditetapkan dan diseleksi dengan kriteria tertentu, antara lain sesuai dengan kebutuhan pelatihan dan memiliki kemampuan memadai. Syarat utama instruktur yakni memiliki kemampuan dalam hal substansi K-2013. Penetapan instruktur umumnya dilakukan oleh pengurus melalui musyawarah dengan anggota. Tetapi di kota Bandung, penetapan instruktur ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan tujuan untuk menjaga kualitas pelatihannya. Penetapan ini mengutamakan guru agar bisa berperan sebagai tutor teman sebaya. Tutor dimaksud ditetapkan dengan kriteria: 1) sudah sering mengikuti pelatihan tentang kurikulum, 2) menguasai materi yang akan dilatihkan, dan 3) mampu menguasai kelas yang merupakan teman sesama guru. Di kota Bima, Instruktur yang ditetapkan adalah yang lulus UKG dengan nilai baik. Sementara di Kota Sorong, memiliki kebijakan bahwa guru yang baru pulang dari pelatihan mendapatkan tugas menjadi instruktur untuk membagi pengetahuannya kepada guru lainnya.

Sejauh ini, tidak selamanya kebutuhan ruangan untuk kegiatan pelatihan di KKG/MGMP dapat dipenuhi karena terbatasnya ruangan kelas yang bisa digunakan untuk kegiatan. Akibatnya kegiatan KKG/MGMP

tidak bisa sering dilaksanakan. Salah satu solusi yang ditempuh oleh KKG/MGMP di kota Bandung adalah, mengatur lokasi kegiatan yang tidak di satu sekolah saja melainkan berganti-ganti. Alat pembelajaran, masih belum tersedia secara memadai, akibatnya aktivitas dalam bentuk simulasi khususnya yang harus menggunakan peralatan percobaan, jarang dilakukan. Sarana IT adakalanya menjadi penghambat kelancaran kegiatan pelatihan di KKG/MGMP karena tidak tersedia di sekolah tempat penyelenggaraannya.

Dana untuk kegiatan di KKG ada yang berasal dari BOS. Dana tersebut masih belum mencukupi, karena tidak ada iuran rutin yang harus dibayar oleh anggota. Kekurangan dana di KKG biasanya didapatkan melalui musyawarah antarpengurus dengan seluruh anggota. Guru biasanya menyediakan dana sendiri seperti untuk transportasi ke tempat pertemuan termasuk dana untuk makanan kecil saat mengikuti kegiatan. Di kota Bima menetapkan regulasi tentang sumber dana, yakni kegiatan MGMP menggunakan beberapa sumber dana yakni: sertifikasi bagi penerima sertifikasi dan bagi penerima non-sertifikasi, disepakati sebagai sumber dana, maupun BOS yang seluruhnya ditetapkan sebagai Dana Operasional MGMP (DOM).

Pemantauan dan Evaluasi KKG/MGMP

Secara umum, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan KKG dan MGMP belum berjalan optimal. Ada daerah yang menjalankan pemantauan dan evaluasi meskipun tidak rutin, tetapi ada yang tidak menjalankannya. Pemantauan dan evaluasi hanya bersifat administrasi saja, belum menyentuh pada substansi. Evaluasi seringkali tidak sesuai dengan konteks kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi guru di lapangan. Akibatnya, laporan hasil pemantauan dan evaluasi hanya bersifat administrasi.

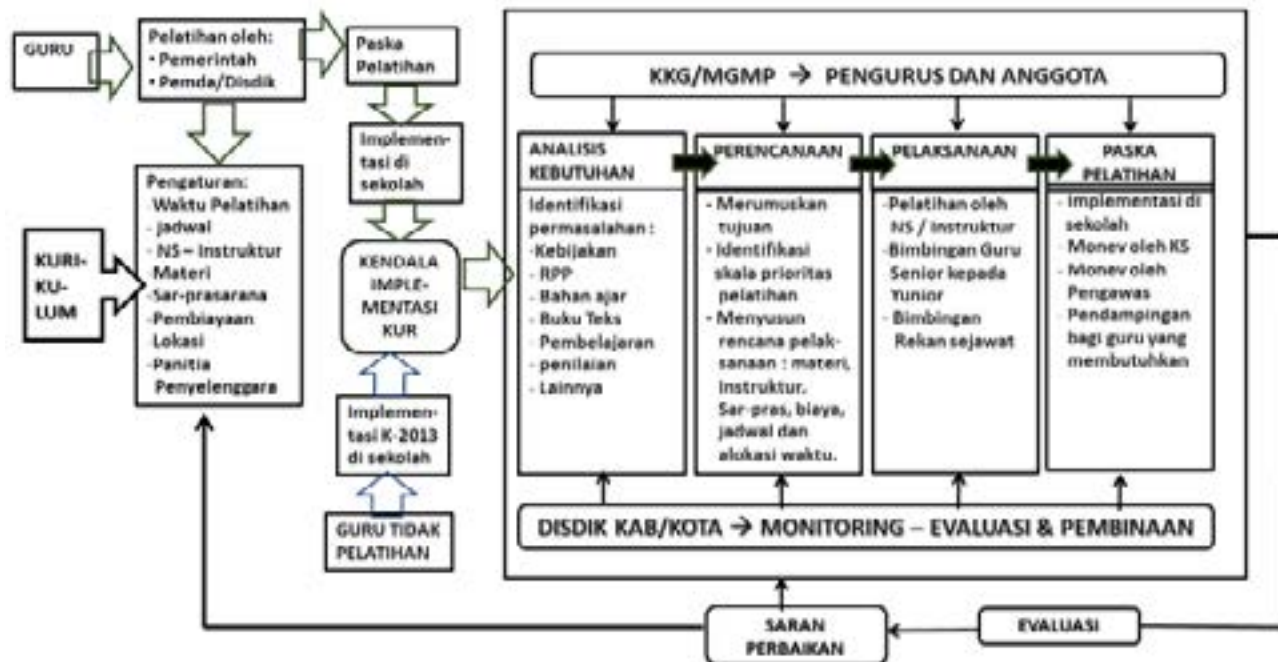
Berkenaan kegiatan KKG/MGMP, sejauh ini dinas pendidikan di empat lokasi sasaran merasa belum berperan secara optimal. Beberapa peran dinas dimaksud masih dalam bentuk, 1) menghimpun dan mengumpulkan data berupa profil KKG/MGMP yang ada di masing-masing wilayah, 2) ikut menetapkan kepengurusan KKG/MGMP secara musyawarah yang dilanjutkan dengan pengesahan dalam bentuk SK, dan 3) mengkoordinasi kegiatan di KKG/MGMP dengan

bantuan Pengawas. Peran yang masih belum optimal yakni, 1) pendampingan pada pelaksanaan pelatihan atau sosialisasi yang dilaksanakan di KKG/MGMP, dan 2) memberikan layanan konsultasi. Sementara itu, pemantauan dan evaluasi terhadap KKG/MGMP oleh Pengawas masih bersifat administrasi.

Rekomendasi

Harus ada upaya pemberdayaan KKG dan MGMP baik di tingkat lokal (sekolah) maupun di tingkat yang lebih tinggi. Unsur dinas pendidikan kabupaten/kota dalam pemberdayaan KKG/MGMP ini berperan sebagai pembina yang sekaligus juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan dan terus menerus yang bisa dilakukan oleh pengawas. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki program-program di KKG/MGMP termasuk pembinaannya. Selanjutnya, direkomendasikan tentang perlunya evaluasi seluruh program KKG/MGMP yang hasilnya digunakan untuk menyempurnakan program pelatihan K-2013 oleh pemerintah maupun program KKG/MGMP. Model Pemberdayaan KKG/MGMP dimaksud baru pada batas diagram konsep model berikut.

MODEL Pelatihan K-2013 OLEH KKG / MGMP



Policy Brief ini merupakan hasil dari penelitian/ kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017 untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-5736365, 5713827. Pos-el: puslitjakdikbud@kemdikbud.go.id.

Tim Peneliti:
Etty Sisdiana
Idris H M Noor
Etty Sofyatingrum
Asri Ika DM
Agus Sudarmaji